



SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT DAN DAERAH: STUDI IMPLEMENTASI DI BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK BARAT

Rizka Yakutun Nafiz¹, Hana Maula Andina Fitri², M. Valino Isnawan³, Lintang Manzumi Ahdi⁴, Vina Fanani⁵, Muhammad Sayyid Akbar⁶, Baiq Nadira Yulisasih⁷, Muhamad Arip Maulana⁸

¹²³⁴⁵⁶Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

lintangmanzumiahdi@gmail.com

anagatahana@gmail.com

nani99@gmail.com

muhammadv@alino16@gmail.com

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan proses penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Keberhasilan proses tersebut tidak terlepas dari sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga visi, misi, sasaran, dan kegiatan yang disusun dapat berjalan sinergis dan saling melengkapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, khususnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lombok Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara, kemudian dianalisa secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAPPEDA Lombok Barat memberikan prioritas penting pada pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pariwisata sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian dan pemerataan pembangunan. Dalam proses sinkronisasi, terdapat tantangan

koordinasi, keterbukaan informasi, dan keterlibatan para pemangku kepentingan yang harus diselesaikan demi mencapai perencanaan yang lebih matang, sinergis, dan mampu memberikan dampak luas bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Pembangunan Daerah, Infrastruktur, Lombok Barat, Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah, BAPPEDA.*

ABSTRACT

Regional development is a crucial process for improving the quality of life, income distribution, and inclusiveness of economic growth. The success of this process cannot be separated from the synchronization of planning between the central and regional governments, ensuring that the visions, missions, goals, and programs are implemented in a coherent and complementary manner. This study aims to analyze the process of synchronization of central and regional planning, particularly at the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) of West Lombok Regency. The study utilizes a qualitative descriptive approach, collecting data through document studies and interviews, then analyzing them in depth. The results show that BAPPEDA West Lombok emphasizes the importance of developing infrastructure, agriculture, and tourism as a way to improve the regional economy and promote equity in development. In the synchronization process, several challenges related to coordination, information disclosure, and stakeholder

participation need to be addressed in order to achieve more comprehensive, synergistic, and impactful planning for the community.

Keywords: Regional Development, Infrastructure, West Lombok, Synchronization of Central and Regional Planning, BAPPEDA.

PENDAHULUAN

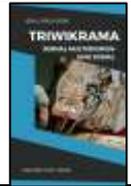
Sistem perencanaan pembangunan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam undang-undang tersebut, perencanaan dibagi menjadi perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Perencanaan jangka panjang diterjemahkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yaitu dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 tahun. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang juga mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Undang-undang ini akan menjadi acuan utama bagi arah pembangunan nasional selama dua puluh tahun ke depan. RPJPD juga menjadi pedoman penting bagi perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga terjadi kesinambungan dan sinkronisasi visi, sasaran, dan program kegiatan yang dilaksanakan di daerah. (Husnul Imtihan, 2016)

Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu daerah yang tengah melaksanakan proses sinkronisasi perencanaan tersebut. Dalam implementasinya, terdapat proses koordinasi, harmonisasi, dan penyelarasan visi, misi, sasaran, dan kegiatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya yang tercantum di RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa proses sinkronisasi perencanaan yang terjadi di BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat, mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi, sekaligus merumuskan solusi dan rekomendasi demi perbaikan proses perencanaan yang lebih sinergis dan mampu memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.

BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat memberikan perhatian dan prioritas yang besar pada penguatan sektor pertanian dan pariwisata, mengingat keduanya merupakan pilar penting perekonomian daerah. Dalam perencanaannya, BAPPEDA merancang program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, nilai tambah hasil pertanian, dan kesejahteraan petani, sambil juga mendorong pengembangan pariwisata yang berbasis potensi lokal. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menjaga kelestarian sumber daya alam, sehingga visi pembangunan yang mandiri, unggul, dan berkelanjutan dapat terwujud.

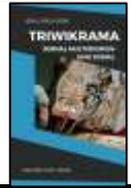
TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian pertama yang berjudul “Kualitas Proses Pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Suatu Evaluasi Terhadap Peran Stakeholders di Kabupaten Lombok Barat” yang ditulis oleh Fikri pada tahun 2001. Hasil penelitian ini mengungkap bahwa proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) di Kabupaten Lombok Barat masih banyak dipengaruhi oleh inisiatif birokrat daerah. Padahal, idealnya Renstra disusun secara partisipatif dan mengedepankan kerja sama yang seimbang dengan berbagai pihak. Namun kenyataannya, peran aktif dari stakeholder lokal masih



belum maksimal. Pemerintah daerah tampak terikat oleh aturan teknis seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, yang membatasi ruang untuk berinovasi dan berpikir kreatif. Kualitas dari Renstra sangat bergantung pada sejauh mana proses penyusunannya melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk legislatif, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil. Bila penyusunan hanya dilakukan oleh kalangan birokrasi tanpa melibatkan pihak lain, maka hasilnya cenderung kurang tajam dan tidak mencerminkan kebutuhan riil. Salah satu tantangan utama dalam penyusunan Renstra adalah mengidentifikasi masalah strategis, yang memerlukan pendekatan analitis mendalam dan data yang akurat. Penelitian ini merekomendasikan agar penyusunan Renstra dimulai dari partisipasi masyarakat akar rumput. Keterlibatan aktif dari Dewan Desa yang kini mulai terbentuk dapat menjadi titik awal penting. Pendekatan ini diyakini dapat meningkatkan kualitas dokumen Renstra, sekaligus memastikan bahwa perencanaan strategis benar-benar menjawab aspirasi dan kebutuhan warga. Dengan melibatkan lebih banyak pihak, Renstra diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan bagi masyarakat lokal. penelitian yang ditulis fikri dengan penelitian ini sama-sama menyoroti isu perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat. Namun, terdapat perbedaan mencolok dalam hal fokus kajiannya. Penelitian yang ditulis Fikri lebih membahas Renstra disusun serta sejauh mana para pemangku kepentingan (stakeholders) terlibat dalam proses itu . Di sisi lain, penelitian mengarah pada bagaimana koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berlangsung, khususnya dalam konteks perencanaan. Penelitiannya berfokus pada peran BAPPEDA sebagai penghubung antara kebijakan nasional dan kebutuhan daerah, termasuk bagaimana informasi, kebijakan, serta sumber daya dikelola agar perencanaan berjalan selaras di berbagai tingkatan pemerintahan. (M. Narazuddin Fikri, n.d.)

Penelitian yang kedua yang berjudul “Sustainable Tourism Development Through The Community-Based “Patju Radja” Concept In West Lombok” yang ditulis oleh Darmawan pada tahun 2025. Penelitian ini mengungkap bahwa pengembangan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat melalui pendekatan “Patju Radja” singkatan dari Pariwisata Maju Rakyat Sejahtera bisa dijalankan secara efektif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pariwisata. Studi ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder. Para informan berasal dari berbagai kalangan, seperti pejabat pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, tokoh masyarakat, serta warga dari wilayah Lembar dan Lembar Selatan, yang dipilih karena potensinya sebagai destinasi wisata yang sedang berkembang. Hasil studi menunjukkan bahwa selama ini peran masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata masih cukup terbatas. Namun demikian, warga lokal menunjukkan semangat dan kesiapan untuk lebih terlibat aktif, terutama karena mereka sadar akan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki daerah mereka. Konsep “Patju Radja” sendiri menawarkan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya bergantung pada peran pemerintah atau investor, tetapi juga berupaya menguatkan kapasitas sosial dan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya pemberdayaan masyarakat dan perubahan pola pikir dalam budaya pelayanan, agar masyarakat mampu mengambil peran penting dalam sektor pariwisata yang terus berkembang. Dalam

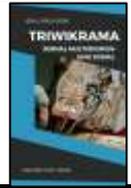


pelaksanaannya, pendekatan ini melibatkan kerja sama antara tiga pihak utama: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ketiganya menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Dengan demikian, "Patju Radja" berpotensi menjadi model pembangunan pariwisata yang tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat lokal. Penelitian yang dilakukan Darmawan dan penelitian sama-sama berfokus pada pembangunan di Kabupaten Lombok Barat yang pentingnya kolaborasi antarpihak. Namun, penelitian Darmawan lebih menyoroti pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada harmonisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Perbedaannya terletak pada pendekatan: yang satu berbasis komunitas sementara yang lain menekankan koordinasi kelembagaan. (Muhamad & Darmawan, 2025)

Penelitian ketiga yang berjudul "Capitalization of Tourism Development Policy In Lombok West Nusa Tenggara Indonesia" yang ditulis oleh Winengan pada tahun 2019. Hasil dari penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan pengembangan kawasan pariwisata Mandalika sejak awal lebih berpihak pada kepentingan bisnis daripada masyarakat lokal. Sejak tahun 1989, proses pengadaan lahan dilakukan tanpa melibatkan warga yang tinggal dan menggantung hidup dari lahan tersebut. Justru, kebijakan ini dirumuskan oleh pemerintah daerah bersama PT. LTDC dan kalangan akademisi, dengan peran dominan pemerintah sebagai penentu arah kebijakan. Meski diklaim untuk kepentingan pengembangan pariwisata, kenyataannya kebijakan tersebut justru memfasilitasi pengambilalihan lahan warga seluas lebih dari 1.200 hektare. Dalam perjalanannya, PT. LTDC bahkan menjual sahamnya kepada pihak lain tanpa persetujuan pemerintah daerah, sehingga porsi kepemilikan pemerintah atas kawasan itu ikut menyusut. Ketidakadilan ini memicu gelombang protes masyarakat yang terusir dari tanah yang telah mereka garap bertahun-tahun. Penelitian ini menekankan bahwa arah kebijakan lebih menguntungkan pelaku usaha dan pembangunan ekonomi, sementara suara dan kebutuhan masyarakat lokal diabaikan. Jika dilihat dari sudut pandang teori pilihan rasional dan ekonomi-politik, kebijakan ini mencerminkan proses politik yang dikuasai oleh elite dan pemilik modal. Akibatnya, kebijakan yang seharusnya berpihak pada masyarakat justru berubah menjadi alat untuk memenuhi kepentingan bisnis semata. Penelitian Winengan menyoroti dominasi kepentingan bisnis dalam kebijakan pariwisata Mandalika yang mengabaikan masyarakat lokal. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada masalah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perencanaan pembangunan. Jadi, perbedaannya terletak pada fokus aktor dominan: bisnis dan koordinasi birokrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dimana pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses sinkronisasi perencanaan antara pemerintahan daerah dan pusat, khususnya di kabupaten Lombok barat. Pendekatan ini digunakan karena sesuai dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian, khususnya dalam konteks kebijakan publik dan perencanaan pembangunan. Metode kualitatif dilakukan pada latar alamiah yang berfokus pada pemaknaan bukan secara umum, sehingga cocok untuk digunakan. (Nurrisa & Hermina, 2025)



Data-data primer dikumpulkan melalui wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, serta jurnal dan penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Teknis analisis datanya dilakukan dalam beberapa tahapan seperti, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun untuk teknik keabsahan datanya dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi data yang dimana data-data yang sudah dikumpulkan baik itu berupa data primer hasil dari wawancara dan data sekunder hasil dari jurnal dan publikasi ilmiah yang relevan, dibandingkan dengan kenyataannya untuk memperkuat validitas informasi data yang telah diperoleh.

KERANGKA PEMIKIRAN

Sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam sistem pemerintahan desentralisasi di Indonesia. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah pusat memiliki dokumen perencanaan seperti RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan Renstra Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) yang berfungsi sebagai panduan arah pembangunan secara makro. Sementara itu, pemerintah daerah menyusun perencanaan melalui dokumen seperti RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), yang umumnya disusun melalui proses partisipatif seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Dalam praktiknya, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara rencana pusat dan daerah akibat perbedaan prioritas, waktu penyusunan, sumber daya, serta dinamika politik di masing-masing level pemerintahan.

Secara teoritis, konsep sinkronisasi dalam perencanaan dapat dijelaskan melalui pendekatan integrasi vertikal dalam teori kebijakan publik. Sinkronisasi menuntut adanya keselarasan antara tujuan, program, dan indikator kinerja antara pusat dan daerah. Menurut Sabatier (1986), dalam implementasi kebijakan multi-level, harmonisasi rencana menjadi tantangan utama karena melibatkan koordinasi lintas institusi dengan kepentingan yang berbeda. Selain itu, teori perencanaan dalam konteks desentralisasi (Litvack & Seddon, 1999) menekankan pentingnya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang efektif antar pemerintah untuk mencapai hasil pembangunan yang kohesif dan berkelanjutan. (Litvack et al., n.d.)

Dalam konteks penelitian ini, kerangka pemikiran difokuskan pada bagaimana BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat sebagai institusi teknis perencana daerah menjalankan perannya dalam menyusun perencanaan pembangunan yang tidak hanya berbasis aspirasi lokal, tetapi juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Proses ini mencakup pemetaan tingkat kesesuaian antara dokumen RPJMD dan RKPD daerah dengan RPJMN dan Renstra K/L, serta identifikasi hambatan dan faktor pendukung yang mempengaruhi proses sinkronisasi tersebut. Faktor-faktor tersebut dapat berupa aspek teknis seperti ketersediaan data dan kapasitas SDM, serta aspek non-teknis seperti koordinasi antar lembaga, kesenjangan waktu perencanaan, perbedaan prioritas politik, dan kerangka regulasi yang belum harmonis.

Dengan kerangka pemikiran ini, penelitian diarahkan untuk menjawab sejauh mana efektivitas sinkronisasi perencanaan di tingkat daerah dapat diwujudkan dalam praktik, serta apa



saja faktor-faktor krusial yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan integrasi antara rencana pusat dan daerah. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang mendalam terhadap realitas implementasi kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk peningkatan kualitas sinergi antar tingkat pemerintahan dalam kerangka pembangunan nasional yang lebih terkoordinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyusunan Perencanaan di Daerah- Musrenbang, RPJMD, RKPD

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat saat ini tengah menyusun berbagai dokumen perencanaan penting sebagai landasan pembangunan ke depan. Salah satu dokumen utama adalah RPJMD 2025-2029, yang mengusung tema “Sejahtera dari Desa.” Dokumen ini menjadi acuan arah pembangunan lima tahunan yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD saat ini telah memasuki tahap konsultasi publik, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dalam konsultasi ini, arah kebijakan pembangunan didiskusikan secara terbuka agar aspiratif dan realistis. Tema besar yang diangkat menitikberatkan pada pemerataan kesejahteraan yang dimulai dari desa. Hal ini mencerminkan komitmen pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal.

Selain RPJMD, pemerintah daerah juga menyusun RPJPD 2025-2045 dan RPD 2025-2026 sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah transisi. Proses penyusunan ini dilakukan melalui forum konsultasi publik yang diadakan pada awal tahun, dengan tujuan menjaring masukan dari berbagai unsur masyarakat. RPJPD berfungsi sebagai visi jangka panjang daerah hingga 2045, yang selaras dengan pembangunan nasional. Sedangkan RPD disiapkan sebagai dokumen transisi yang menghubungkan RPJMD periode lama dan baru. Forum ini juga menjadi ruang untuk menyelaraskan isu-isu strategis seperti ketahanan ekonomi, pembangunan manusia, dan pengelolaan lingkungan. Penyusunan RPJPD dan RPD ini menunjukkan kesiapan Lombok Barat menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang. Semua dokumen tersebut diintegrasikan untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi kebijakan daerah. (Lalu Ariyan Darmandita, n.d.)

Dokumen tahunan seperti RKPD Tahun 2026 juga tengah disiapkan secara partisipatif melalui konsultasi publik yang diselenggarakan di Senggigi pada Februari 2025. RKPD ini menjadi panduan program dan anggaran daerah untuk satu tahun ke depan. Dalam penyusunannya, Pemda Lombok Barat mengedepankan prinsip inklusif dengan mengundang kelompok rentan seperti penyandang disabilitas agar rencana pembangunan tidak diskriminatif. Selain itu, penyusunan RKPD juga diarahkan agar sejalan dengan RPJMD dan RPJPD yang sedang dirancang. Dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD, dokumen anggaran tahunan seperti RAPBD akan memiliki pijakan strategis yang jelas. Ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang terarah, realistis, dan bisa dilaksanakan secara optimal. Forum ini juga menjadi sarana untuk menegaskan prioritas daerah dalam konteks pembangunan provinsi dan nasional. (Bappedalobar, Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026, n.d.)

Program penguatan data melalui Desa Cantik (Desa Cinta Statistik) juga sedang digalakkan untuk memperbaiki kualitas data perencanaan. Program ini dilakukan dengan melatih aparat desa



dalam pengumpulan dan pengelolaan data yang akurat. Data yang terkumpul akan menjadi dasar dalam penyusunan program pembangunan desa maupun kabupaten. Pemerintah juga memberikan bantuan peralatan dan insentif agar desa dapat menjalankan fungsi statistik secara mandiri. Sementara itu, penyusunan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2024-2040 juga sedang dalam tahap pemaparan dan pembahasan lintas sektor. RTRW ini akan menggantikan dokumen lama dari tahun 2011 dan menjadi pedoman pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan. Dalam penyusunannya, Pemda Lombok Barat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar terjadi harmonisasi tata ruang lintas wilayah. RTRW akan menetapkan zonasi pemukiman, kawasan industri, pariwisata, hingga kawasan konservasi. Keberadaan RTRW sangat penting untuk mencegah konflik pemanfaatan lahan serta mendukung pembangunan infrastruktur dan investasi. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) dan izin-izin pembangunan. Dengan RTRW baru, pembangunan Lombok Barat dapat lebih tertata dan berkelanjutan secara lingkungan dan ekonomi. (Radianto Wijanarko, n.d.)

Dari sisi substansi, perencanaan pembangunan saat ini menekankan isu-isu strategis seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, pengurangan stunting, peningkatan iklim investasi, dan penguatan pelayanan dasar. Dalam Musrenbang terakhir, isu-isu ini diprioritaskan karena dinilai sebagai tantangan utama pembangunan Lombok Barat. Pemerintah juga mendorong pembangunan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, program-program seperti infrastruktur hijau, pertanian berkelanjutan, dan ketahanan bencana mulai dimasukkan dalam RKPD dan RPJMD. Dengan fokus pada isu-isu tersebut, perencanaan pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Sinergi antara program pusat dan daerah terus diupayakan agar hasil pembangunan bisa maksimal.

Salah satu program unggulan yang tengah dikembangkan adalah “Sejahtera dari Desa”. Program ini menjadi kerangka pembangunan baru di bawah RPJMD 2025-2029 yang ingin memperkuat peran desa sebagai pusat pertumbuhan. Dalam kerangka ini, desa diberi peran lebih besar dalam mengelola dana, menyusun rencana, dan menjalankan program strategis lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mempercepat pembangunan ekonomi desa. Pemerintah juga mendampingi desa-desa dalam menyusun RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) agar selaras dengan rencana kabupaten. Selain itu, sektor unggulan seperti pariwisata berbasis masyarakat dan pertanian lokal menjadi fokus pembangunan desa. Dengan membangun dari desa, diharapkan dampak pembangunan lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi. (2024, 2 Oktober). *UU Nomor 59 Tahun 2024: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. *JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman Dan Investasi.*, n.d.)

Akhirnya, seluruh proses perencanaan ini diarahkan untuk menghasilkan dokumen dan program yang terukur melalui indikator kinerja yang jelas. Pemerintah daerah menyusun indikator pembangunan yang tajam dan berbasis data untuk setiap program strategis. Evaluasi tahunan dilakukan melalui LKJP dan laporan evaluasi RPJMD. Pemerintah juga melakukan penyesuaian kebijakan berdasarkan capaian dan tantangan yang muncul. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas belanja daerah juga menjadi sasaran dalam proses perencanaan. Dengan perencanaan



yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi hasil, Lombok Barat diharapkan dapat mencapai target-target pembangunannya secara berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa perencanaan saat ini tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial dalam membawa perubahan.

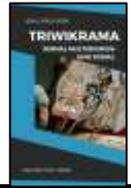
Sinkronisasi dengan Rencana Pusat (RPJMN, Renstra K/L) dalam tingkat kesesuaian, hambatan teknis dan politis

Salah satu komponen kunci untuk menjamin keterpaduan, keberlanjutan, dan keberhasilan pembangunan di Indonesia adalah sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, seperti Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Sinkronisasi ini telah terjadi dalam beberapa hal baik secara formal maupun substantif dalam proses pelaksanaannya di Kabupaten Lombok Barat. Secara umum, program prioritas daerah BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat selaras dengan kebijakan nasional yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024, terutama di bidang pembangunan berbasis wilayah, kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dalam prioritas pembangunan tahun 2025, yang mencakup pembangunan infrastruktur strategis seperti Dermaga Pelabuhan Senggigi sebagai upaya untuk meningkatkan industri perjalanan dan pariwisata, serta Alun-Alun Taman Kota Gerung dan Bundaran Alun-Alun Giri Menang. Proyek-proyek ini, yang mulai masuk proses lelang pada pertengahan tahun dan dianggarkan melalui APBD Perubahan serta Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat, menunjukkan hubungan nyata antara program nasional dan implementasi di daerah.

Selain itu, strategi pertumbuhan jangka panjang Kabupaten Lombok Barat selaras dengan ambisi pembangunan negara. Menurut BAPPEDA, program “Sejahtera dari Desa” akan memfokuskan kebijakan pembangunan pada masyarakat selama lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dalam RPJMN, yang menekankan pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan. (Alviya & Yosefi Suryandari, 2009)

Terdapat bukti nyata bahwa kebijakan pusat telah dimasukkan ke dalam agenda daerah melalui inisiatif seperti pinjaman tanpa bunga untuk UMKM desa, memperkuat kelembagaan desa, dan membantu sektor-sektor produktif lokal. Selain itu, pemerintah daerah juga telah berfokus pada industri seperti pariwisata dan pertanian yang memiliki dampak pengganda yang signifikan. Dengan pajak hotel dan restoran sebesar Rp 50 miliar per tahun, pariwisata telah menjadi kontributor utama pendapatan asli daerah (PAD). Untuk meningkatkan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat yang lebih luas, industri pariwisata bekerja sama dengan industri lain seperti pertanian dan perikanan. (SUARANTB.com, n.d.)

Namun demikian, sejumlah masalah teknologi menghambat sinkronisasi untuk berfungsi dengan baik selama penyelarasan ini. Perbedaan waktu persiapan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah merupakan salah satu tantangan utama. Penyelarasan prioritas dan inisiatif dapat menjadi tantangan karena RPJMN lima tahunan Bappenas belum tentu selaras dengan siklus RPJMD daerah. Hal ini diperparah dengan lemahnya kemampuan manajemen dan teknis para perencana di daerah untuk memahami logika dan indikasi pembangunan nasional.



Meskipun penggunaan sistem informasi seperti KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) dan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) telah dimulai, namun integrasinya masih kurang. Selain itu, masih ada masalah dengan fragmentasi data antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena basis data yang berbeda sering kali menyebabkan rencana pembangunan yang tidak sinkron satu sama lain dalam hal kebutuhan, anggaran, dan ukuran keberhasilan.

Namun, hambatan politik juga mempengaruhi kemajuan sinkronisasi. Pemerintah daerah bebas memilih prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Akibatnya, kepentingan lokal dan nasional sering berbenturan. Misalnya, tekanan politik lokal, kebutuhan masyarakat tertentu, atau filosofi kepemimpinan yang berbeda dapat menghalangi inisiatif pembangunan yang dianggap penting oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan porsi yang signifikan dalam rencana kerja pemerintah daerah.

Begitupun Karena petani dan buruh tani merupakan mayoritas penduduk di Lombok Barat, disebutkan dalam sebuah wawancara dengan BAPPEDA Lombok Barat bahwa pembangunan daerah didasarkan pada kebutuhan aktual masyarakat, seperti memperkuat fasilitas irigasi dan memberikan bantuan mesin pertanian. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya konsisten dengan kerangka kerja program nasional, penekanan pada pengembangan desa wisata merupakan gambaran lain tentang bagaimana pembangunan daerah berusaha untuk mengatasi masalah-masalah lokal secara kontekstual. (*Bappedalobar* , *Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026* , n.d.)

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lombok Barat telah mengembangkan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah secara formal dan signifikan. Namun pada kenyataannya, masih ada hambatan politik yang diakibatkan oleh perbedaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah serta kesulitan teknologi termasuk kapasitas sumber daya manusia, integrasi sistem, dan sinkronisasi waktu. Menyelaraskan kalender perencanaan nasional-daerah, menyediakan pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi para perencana daerah, memperkuat integrasi data dan sistem informasi, serta meningkatkan komitmen politik lintas sektor merupakan beberapa langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi hal ini dan memungkinkan implementasi arahan pembangunan nasional di tingkat daerah secara nyata dan kontekstual.



Faktor Pendukung Sinkronisasi

a. Kerangka Regulasi yang Jelas

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan nasional Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan memberikan landasan hukum yang kuat untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran.

b. Komitmen Pimpinan Daerah

Berdasarkan aktivitas BAPPEDA Lombok Barat, terlihat adanya komitmen kuat dari pimpinan daerah dalam mendukung proses perencanaan yang tersinkronisasi, seperti yang terlihat dalam pelaksanaan Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik.

c. Mekanisme Koordinasi yang Terstruktur

Adanya forum-forum koordinasi seperti Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang yang memfasilitasi sinkronisasi antara berbagai stakeholder dalam perencanaan pembangunan.

d. Sistem Informasi Terintegrasi

Pengembangan sistem informasi yang mendukung proses perencanaan dan koordinasi antar instansi.

e. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat melalui mekanisme konsultasi publik dan Musrenbang memberikan dukungan untuk legitimasi dan sinkronisasi program pembangunan.

Faktor Penghambat Sinkronisasi

a. Keterbatasan Sumber Daya

Adanya keterbatasan sumber daya Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan | Retizen baik dalam hal anggaran, SDM, maupun infrastruktur teknologi dapat menghambat proses sinkronisasi yang efektif.

b. Perubahan Kepemimpinan

Keberlanjutan sebuah proyek yang terhambat jika pemimpinnya terganti Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan | Retizen menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi sinkronisasi perencanaan jangka panjang.

c. Koordinasi Antar Instansi

Kompleksitas koordinasi antara berbagai perangkat daerah dengan tupoksi yang berbeda dapat menjadi penghambat dalam mencapai sinkronisasi yang optimal.

d. Lemahnya Sosialisasi



Lemahnya sosialisasi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan | Retizen program dan kebijakan dapat menghambat pemahaman dan implementasi yang seragam di berbagai level organisasi.

e. Ketidaksiharian Perencanaan

Perencanaan yang kurang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan | Retizen dapat mengakibatkan tidak optimalnya sinkronisasi dalam implementasi.

f. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Tingginya ketergantungan pada pemerintah Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Perencanaan Pembangunan | Retizen pusat dapat menghambat fleksibilitas dalam penyesuaian program sesuai kebutuhan lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya adalah bahwa meskipun terdapat upaya signifikan dalam menyelaraskan perencanaan daerah dengan kebijakan nasional (terutama dalam prioritas pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pariwisata), masih ada tantangan yang signifikan. Tantangan ini meliputi hambatan koordinasi antar instansi, keterbatasan akses informasi, dan keterlibatan pemangku kepentingan yang kurang optimal. Meskipun terdapat kerangka regulasi yang jelas dan komitmen dari pimpinan daerah, keterbatasan sumber daya (anggaran, SDM, teknologi), perubahan kepemimpinan, dan lemahnya sosialisasi program menghambat tercapainya sinkronisasi yang efektif. Program unggulan seperti "Sejahtera dari Desa" menunjukkan komitmen untuk pembangunan yang inklusif dan berbasis desa, namun keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengatasi hambatan yang telah diidentifikasi. Secara keseluruhan, sinkronisasi perencanaan di Lombok Barat menunjukkan kemajuan, tetapi memerlukan perbaikan untuk mencapai sinergi yang lebih optimal antara perencanaan pusat dan daerah.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat:

1. Penguatan Koordinasi Antar Instansi: Diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dan terstruktur antara BAPPEDA, perangkat daerah lain, dan pemerintah pusat. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan komunikasi, pertemuan rutin, dan platform digital yang terintegrasi untuk berbagi informasi dan koordinasi program.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi para perencana di BAPPEDA dan perangkat daerah terkait sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kebijakan nasional dan metodologi perencanaan yang efektif. Pelatihan ini harus mencakup aspek teknis (penggunaan sistem informasi, analisis data) dan non-teknis (negosiasi, komunikasi).

3. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi: Peningkatan akses informasi yang akurat dan terkini tentang kebijakan nasional dan program pusat sangat penting. Integrasi sistem informasi yang lebih baik antara



pemerintah pusat dan daerah (seperti KRISNA dan SIPD) perlu dimaksimalkan untuk memastikan data yang konsisten dan terintegrasi.

4. Peningkatan Partisipasi Pemangku Kepentingan: Keterlibatan aktif masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dalam proses perencanaan perlu ditingkatkan melalui mekanisme konsultasi publik yang lebih inklusif dan partisipatif. Pendapat dan aspirasi mereka harus dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan.

5. Penguatan Kelembagaan: Penguatan kelembagaan BAPPEDA sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah sangat penting. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan SDM, dan akses terhadap sumber daya yang memadai.

6. Sosialisasi yang Efektif: Sosialisasi yang efektif tentang program dan kebijakan pembangunan perlu dilakukan untuk memastikan pemahaman dan implementasi yang seragam di semua level pemerintahan dan masyarakat. Sosialisasi harus menggunakan berbagai media dan metode yang mudah dipahami oleh masyarakat.

7. Evaluasi dan Monitoring yang Berkala: Evaluasi dan monitoring yang berkala terhadap proses sinkronisasi perencanaan sangat penting untuk mengidentifikasi hambatan dan keberhasilan program. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbaiki proses perencanaan dan meningkatkan efektivitas sinkronisasi.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat dapat ditingkatkan, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Alviya, I., & Yosefi Suryandari, E. (2009). KENDALA DAN STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN KPH RINJANI BARAT. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 6(1), 1-14.
<https://doi.org/10.20886/jpsek.2009.6.1.1-14>
- bappedalobar , *Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2026*, . (n.d.).
- Husnul Imtihan, Dr. W. S. Br. M. F. M. S. (2016). *PERAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. (2024, 2 Oktober). *UU Nomor 59 Tahun 2024: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045*. *JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi*. (n.d.).
- Lalu Ariyan Darmandita, H. S. (n.d.). "Lombok Barat Luncurkan Program Desa Cinta Statistik untuk Satu Data Desa Indonesia.", *RRI*, 19, sep 2024.
- Litvack, J., Seddon, J., Ahmad, J., Blair, H., Esmail, T., Ford, J., Hoffman, B., Kerr, G., King, E., Kolehmainen-Aitken, R.-L., Lutz, E., Mclean, K., Rondinelli, D., Sewell, D., Shah, A., De Tommaso, G., & Weist, D. (n.d.). *WORLD BANK INSTITUTE WBI Working Papers in collaboration with PREM network Decentralization Briefing Notes*.
- M. Narazuddin Fikri. (n.d.). *document (1)*.
- Muhamad, M., & Darmawan, A. (2025). Sustainable Tourism Development Through The Community-Based "Patju Radja" Concept In West Lombok. *Jurnal Toursci*, 2(4), 259-268.
<https://doi.org/10.62885/toursci.v2i4.625>
- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*, 2(3), 793-800.
- Radianto Wijanarko, P. B. I. (n.d.). *5 Tahun ini Lobar Berhasil Lampau Target RPJMD Januari 7th, 2025*.
- SUARANTB.com. (n.d.). *Sejumlah Persoalan Mendesak Ditangani, RTRW 2025-2045 Harus Berpihak pada Rakyat dan Masa Depan Lobar*.